

**Judul** : Demokrat Tolak Interpelasi Hambalang  
**Tanggal** : Jumat, 16 Nopember 2012  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 2

## Demokrat Tolak Interpelasi Hambalang

[JAKARTA] Badan Akuntabilitas keuangan Negara (BAKN) DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut merupakan salah satu hasil rekomendasi BAKN kepada Pimpinan DPR pada Rabu (14/11). Wakil Ketua DPR Anis Mata yang menerima secara langsung hasil rekomendasi BAKN tersebut mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR bisa saja mengajukan usulan hak interpelasi.

“Soal desakan agar DPR mengajukan usulan hak interpelasi, nanti akan disampaikan pada rapat. Pengajuan usulan hak interpelasi itu ada mekanisme dan prosedur-

nya. Mungkin temuan BAKN DPR bisa menjadi rujukan,” kata Anis Mata usai menerima pimpinan dan anggota BAKN, di Jakarta, Rabu (14/11).

Namun adanya wacana interpelasi tersebut langsung ditolak Partai Demokrat. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul berpendapat, usulan interpelasi tersebut tidak akan terwujud. “Usulan interpelasi tak mungkin terjadi. Mereka (anggota DPR yang mendorong interpelasi) hanya mimpi di tengah jalan,” tukas Ruhut. Anggota Komisi III DPR tersebut beralasan, dari sembilan fraksi di DPR, hanya dua fraksi besar yang bakal mendukung interpelasi. Kedua fraksi itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan, fraksi yang tersisa bakal menolak usulan interpelasi. “Aku ter-tawa termehek-mehek dengan adanya usul interpelasi kasus Hambalang,” ucapnya.

Dia menambahkan, wacana interpelasi atas proyek P3SON sarat dengan muatan politis. Target dari interpelasi tentu untuk menggoyang stabilitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Menurut Ruhut, daripada menyatakan interpelasi, lebih baik penyimpangan P3SON diserahkan kepada proses hukum.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

**“ Hak interpelasi ini bagus untuk mendorong lebih cepat agar kasus ini selesai baik secara politik maupun hukum.”**

(Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan salah satu Rekomendasi BAKN yang juga sangat mengigit adalah mengusul-

kan hak interpelasi untuk melanjutkan atau memperdalam penyimpangan proyek P3SON. “Hak interpelasi ini bagus untuk mendorong lebih cepat agar kasus ini cepat selesai baik secara politik maupun hukum. Hasil BAKN ini sangat tegas, terus terang menyebut nama-nama pejabat negara yang melakukan penyelewengan kewenangan mereka,” katanya.

Ketua BAKN Sumaryati Aryoso mengungkapkan, berdasarkan hasil telaahan BAKN terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terbukti telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek dan pihak terkait, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 243,66 miliar. [C-6]